



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putu Arnata, ST

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

Denpasar, Januari 2021

Pihak Pertama,

Putu Arnata, ST

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Denpasar

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,27
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	89,64
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 Skala
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65

Program		Anggaran
1.	Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Rp. 96.866.000
2.	Meningkatkannya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Rp. 8.160.000
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp. 1.700.000
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegritas, efektif, transparan, dan aksesibel	Rp. 9.210.000
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Rp. 8.760.000

Pihak Kedua,

Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

Denpasar, Januari 2021

Pihak Pertama,


Putu Arnata, ST